

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh merupakan kawasan wisata yang cukup populer keberadaannya baik itu di Kabupaten Pesisir Selatan. Kawasan ini juga kawasan yang ikut menyumbang pendapatan daerah dan angka kunjungan yang tinggi setiap tahunnya. Sehingga penting rasanya bagi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mewujudkan kawasan wisata ini sebagai kawasan wisata yang memenuhi aspek-aspek pada pembangunan kepariwisataan berkelanjutan dalam bingkai visi misi yang perlu dicapai oleh pemerintah daerah.

Pada temuan dan analisis yang peneliti lakukan selama melakukan penelitian di kawasan ini dapat disimpulkan bahwa Pembangunan Berkelanjutan di KWBT Mandeh ini belum bisa dikatakan berjalan dengan baik. Pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan sebagai *leading sector* pembangunan berkelanjutan di KWBT Mandeh masih terdapat beberapa kekurangan serta keterbatasan pemerintah dalam mencakup seluruh aspek dalam pembangunan seperti aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan.

Dalam dimensi ekonomi peneliti menemukan bahwa kawasan wisata ini turut menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Selatan baik itu yang bersumber dari pajak maupun retribusi. Adanya Kawasan Wisata Mandeh tentu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Dengan banyaknya objek wisata baru yang bermunculan, maka masyarakat berlomba-lomba dalam membangun usaha mereka itu sendiri baik itu usaha jasa seperti penginapan, usaha penyewaan kapal wisata maupun usaha berjualan makanan/minuman. Tidak hanya dampak positif saja yang didapat, dampak negatif dari keberlangsungan sektor ekonomi juga dapat ditemukan di kawasan ini. Seperti kepadatan lalu lintas yang terjadi di hari tertentu yang menyebabkan kemacetan dan kawasan wisata yang tidak setiap harinya ramai dikunjungi oleh wisatawan yang menyebabkan tidak stabilnya pendapatan para pelaku usaha dalam menghadapi wisatawan yang bersifat musiman.

Dalam dimensi sosial ada beberapa permasalahan yang cukup menjadi perhatian. Pertama, permasalahan keadilan pembangunan di sekitar kawasan wisata yang tidak bisa memuat semua usulan pembangunan yang diberikan karena keterbatasan anggaran pembangunan. Kedua, permasalahan kesamaan sikap seperti yang dihadapi masyarakat lokal dalam memberikan pelayanan dan kemampuan bahasa asing yang masih terbatas ketika datang wisatawan asing. Ketiga, permasalahan etika yang akan menjadi sumber masalah baru bagi kepariwisataan di Mandeh. Hal itu disebabkan karena masih ada beberapa wisatawan asing yang belum memperhatikan norma-norma dan aturan yang berlaku di kawasan wisata. Keempat, permasalahan kesamaan mitra yang menuntut pemerintah dengan para *stakeholder* harus bekerja sama dengan baik karena Kawasan Wisata Mandeh merupakan kawasan wisata yang besar.

Dalam dimensi lingkungan, dengan dibukanya beberapa objek wisata baru di Kawasan Wisata Mandeh tentu akan mengganggu kepada bentuk lingkungan yang alami. Perubahan bentuk alam diduga akan menjadi masalah dikemudian hari karena kebutuhan wisata bagi masyarakat itu sendiri. Ada beberapa permasalahan seperti flora dan fauna yang harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya. Ada juga permasalahan pencemaran baik itu seperti sampah maupun limbah yang dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan makhluk hidup. Dan yang terakhir perubahan bentuk alam di sekitar, yang disebabkan oleh manusia itu sendiri seperti kejadian longsor yang kerap membayangi ketika datangnya musim hujan.

Maka dari itu, perlu dilakukan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh mengingat kawasan ini akan selalu ramai dikunjungi. Karena tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri merupakan pembangunan yang memberikan kebaikan kepada dimensi ekonomi, sosial serta lingkungan bagi kawasan wisata untuk masa yang akan datang.

## 6.2. Saran

1. Pemerintah bersama-sama dengan *stakeholder* lainnya dalam pembangunan berkelanjutan pada Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh (KWBT) diharapkan dapat

dengan segera membuat kelompok kerja atau dokumen tertulis dalam melakukan pembagian kerja dan melaksanakan kewenangan masing-masing secara jelas dan terukur.

2. Pemerintah diharapkan dapat memberikan kemudahan investasi bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya ke kawasan wisata ini dengan cara penyederhanaan regulasi, pengurusan administrasi yang tidak memakan waktu, komunikasi yang baik antar instansi terkait, serta sosialisasi yang jelas bagi para investor dalam hal informasi investasi.
3. Meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat serta para pelaku usaha jasa wisata dalam membangun kualitas sumber daya manusia dalam pelatihan dan pembinaan yang dapat mencakup seluruh pihak yang berhak.

